

## **BAB IV**

### **STRATEGI GERAKAN KAUM LESBIAN, GAY, BISEKSUAL DAN TRANSGENDER DI THAILAND UNTUK MENDORONG LAHIRNYA RUU GENDER KETIGA**

Komunitas lesbian, gay, biseksual dan transgender di Thailand seiring dengan pertumbuhan dalam kuantitas atau jumlah penganut LGBT dan terkait dengan perkembangan peradaban hidupnya memunculkan beberapa strategi berupa gerakan atau aksi.

Strategi gerakan kaum lesbian, gay, biseksual dan transgender di Thailand memiliki tujuan untuk mendorong pemerintah Thailand dalam melahirkan Rancangan Undang-Undang Gender Ketiga dalam rangka melindungi kehidupan seksual dan sosial di Thailand.

#### **A. Pertumbuhan Komunitas LGBT DI Thailand**

Peristiwa sejarah tentang munculnya LGBT dari jaman kerajaan di Thailand hingga saat ini membuat kaum LGBT menjadi tumbuh berkembang hingga periode sekarang karena diikuti oleh gaya hidup yang mengadopsi budaya Barat sebagai bentuk akulturasi budaya oleh para LGBT hingga pada akhirnya mereka memiliki keberanian untuk mengadakan aksi atau gerakan terkait dengan legalisasi status mereka di Thailand terhadap pemerintah Thailand sehubungan dengan status hukum mereka yang diaktualisasikan melalui Rancangan Undang-Undang Gender Ketiga.

Beberapa komunitas LGBT di Thailand:

- a. Anjaree,
- b. Sapaan,
- c. Rainbow Sky Association of Thailand (RSAT),
- d. Bangkok Rainbow, dan

#### e. Thai Transgender Alliance

Komunitas LGBT di Thailand ini merupakan salah satu fenomena yang menjadi perhatian publik hampir di seluruh dunia terkait dengan sejarah munculnya mereka pada beberapa abad yang lalu hingga periode saat ini.

Perkembangan jumlah kaum LGBT di Thailand yang semakin subur selain dipengaruhi oleh sejarah juga tidak terlepas dari peran Organisasi Perdamaian Bangsa-Bangsa yang saat ini telah menyatakan bahwa LGBT merupakan salah satu perwujudan dari Hak Asasi Manusia yang harus dilindungi hak-hak sosialnya (United Nations, 2011).

Hal ini menjadi suatu senjata bagi kaum LGBT di Thailand untuk lebih percaya diri dalam melakukan gerakan atau aksi mereka untuk mendorong pemerintah Thailand untuk segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Gender Ketiga sebagai upayanya dalam melindungi keberadaan mereka di Thailand.

### **B. Strategi Gerakan Kaum LGBT di Thailand**

Komunitas LGBT seperti Anjaree, Sapaan, Rainbow Sky Association of Thailand (RSAT), Bangkok Rainbow, dan Thai Transgender Alliance diketahui telah melakukan aksi atau gerakan melalui beberapa strategi.

#### **Bekerjasama antar komunitas LGBT pada saat melakukan kegiatan kampanye anti diskriminasi terhadap ekspresi seksual mereka di Thailand.**

Seiring dengan tumbuh kembangnya jumlah LGBT di Thailand, beberapa komunitas LGBT seperti Anjaree, Sapaan, Rainbow Sky Association of Thailand (RSAT), Bangkok Rainbow, dan Thai Transgender Alliance menjalin kerjasama yang erat satu sama lain saat melakukan kampanye anti diskriminasi terhadap ekspresi seksual mereka di Thailand.

Hal ini dilakukan dalam rangka menciptakan kondisi yang semarak dan penuh antusias dalam memancing perhatian masyarakat pada umumnya mengingat bahwa sebagian besar orang Thai masih belum menerima keberadaan mereka (Jackson, 2011). Di satu sisi, segala bentuk diskriminasi masih dialami oleh komunitas LGBT seperti kesempatan mendapatkan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari dimana beberapa pekerjaan akademis dan non akademis masih sulit untuk ditempati oleh komunitas LGBT (Suriyasarn, 2014).

Sebagian besar orang Thai masih menganggap bahwa semua orang yang bekerja di Thailand terkait dengan apapun posisinya harus tetap mendasarkan pada nilai-nilai spiritual dan nilai moral masyarakat sehubungan dengan citra atau image dari jenis pekerjaan yang dilakukan oleh mereka. Sehingga apabila pekerjaan dilakukan oleh komunitas LGBT maka pekerjaan tersebut dipandang tidak mencerminkan nilai-nilai spiritual dan nilai moral.

Bentuk diskriminasi lain adalah hak para kaum LGBT dalam mendapatkan pendidikan yang layak dimana terdapat beberapa kampus yang masih melarang para mahasiswa atau mahasiswi yang terindikasi Lesbian, Gay, Bisaksual ataupun Transgender karena kampus berpandangan bahwa pendidikan merupakan salah satu cerminan dari pemberdayaan budaya yang disertai dengan nilai-nilai norma yang berlaku di masyarakat bahwa hanya orang-orang yang di luar komunitas LGBT sajalah yang merupakan mahasiswa cerminan pengembangan budaya dan nilai norma (Sinnott, 2011).

Salah satu aksi LGBT yang melibatkan tempat pendidikan terjadi pada tanggal 17 Mei 2014 in Bangkok, Thailand. Aksi ini berupa kampanye yang dilakukan sekolah dan universitas di Bangkok berupa penghapusan kekerasan terhadap remaja LGBT dengan label aksinya yakni ‘Power Rainbow Workshop’ untuk pelajar serta

mengadakan pelatihan tentang kebebasan berekspresi bagi pengakuan gender yang terjadi pada para mahasiswa di mana aksi tersebut berupa studi wanita, gender dan seksualitas di Universitas Thammasat.

Selain itu, terdapat pula sekelompok koalisi LGBT yang lebih besar seperti UNAIDS Asia Pacific, UNESCO Asia Pacific, APCOM, Youth Voices Count and Youth Lead yang mengadakan kampanye dengan label “School Rainbow” yang dilakukan pada tanggal 12 Mei 2014 di mana aksi ini berguna untuk mendorong masyarakat secara bersama-sama menggambar pelangi sebagai karya seni menggunakan kapur di ruang kota yang melambangkan pentingnya keragaman dan penggunaan ruang publik. Hasil karya seni tersebut diletakkan di gerbang sekolah dan tempat-tempat lain di mana anak-anak muda cenderung berkumpul dengan perencanaan dan pengorganisasian sebelumnya dengan para siswa, sekolah, dan komunitas lokal. Aksi ini juga membawa 'pelangi ke ruang kelas' dengan dukungan pelajaran tentang keragaman seksual, penerimaan, dan hak atas pendidikan.

Selanjutnya pada tanggal 17 Mei 2014, Anjaree juga mengadakan aksi ‘Power Rainbow Workshop’ untuk pemuda terutama pelajar sekolah menengah serta mahasiswa di Pusat Seni dan Budaya Bangkok. Aksi juga menjadi forum bagi siswa LGBT untuk bertukar cerita tentang kehidupan sekolah mereka serta bagi para pendidik dan siswa dalam mendiskusikan bagaimana mengurangi kekerasan serta praktik diskriminatif dalam lingkungan sekolah khususnya, dan dalam masyarakat Thailand pada umumnya (IDAHO, 2014).

Beberapa kampus di Thailand juga menilai bahwa komunitas LGBT dapat merusak generasi bangsa karena dipandang sebagai komunitas yang tidak memiliki masa depan untuk memajukan bangsa dimana pendidikan hanya digunakan oleh komunitas LGBT untuk sekedar mencari ilmu pengetahuan namun kurang diterapkan dalam kehidupan yang normal seperti dibawa dalam suatu

pernikahan yang suci antara laki-laki dan perempuan dan diteruskan pada generasi muda berikutnya.

Bentuk diskriminasi selanjutnya adalah pada aspek kesehatan dimana beberapa institusi kesehatan seperti rumah sakit atau yang sejenisnya tidak menerima pasien dari komunitas LGBT terkait dengan penularan HIV AIDS yang diderita oleh komunitas LGBT terhadap pasien lainnya sehingga institusi membentuk perlindungan yang kuat terhadap para pasien yang berasal dari komunitas LGBT (UNDP & USAID, 2014). Selanjutnya komunitas LGBT juga menerima diskriminasi dalam bentuk standar kualitas pelayanan kesehatan yang lebih rendah dari kaum normal dimana mereka mendapatkan perlakuan yang kurang sesuai standar rumah sakit terhadap pasien dari para tenaga medis yakni kurang memperhatikan kebutuhan fisik dan psikologisnya yang lemah saat sakit.

Beberapa diskriminasi tersebut sering mereka alami hingga saat ini sehingga kampanye anti diskriminasi perlu mereka adakan untuk memperoleh hak-hak tersebut yang mereka serukan tiap waktu baik kampanye yang bersifat langsung maupun tidak langsung melalui media sosial dengan harapan untuk menyadarkan masyarakat Thailand bahwa tidak ada kaitan secara spesifik antara hak-hak tersebut dengan status LGBT.

Status hak komunitas LGBT di Thailand tersebut juga disuarakan melalui penggunaan teknologi informasi sebagai sarana media untuk memperoleh pengakuan publik dan menjangkau jumlah anggota LGBT serta membuat pamflet yang berisi tuntutan kepada pemerintah Thailand untuk melegalkan orientasi seksual mereka melalui penciptaan Rancangan Undang-Undang (RUU) Gender Ketiga (UNDP & USAID, 2014, hal. 43).

Komunitas LGBT di Thailand diketahui dalam melakukan aksinya untuk mendorong lahirnya Rancangan Undang-Undang Gender Ketiga adalah dengan menciptakan web site yang berisikan berbagai situs terkait dengan kebebasan ekspresi seksual komunitas LGBT di

Thailand beserta tuntutan-tuntutannya pada pemerintah Thailand yang berlandaskan pada Hak Asasi Manusia serta dalam rangka menjaring jumlah komunitas LGBT di Thailand sehingga para LGBT yang ingin menyampaikan pendapatnya dapat bergabung dengan komunitas LGBT yang telah terorganisir tanpa merasa takut terhadap tekanan sosial sekitarnya.

Salah satu web site yang diciptakan oleh komunitas LGBT di Thailand adalah Gay Star News yakni situs yang berisi media berita on line yang diprakarsai oleh anggota LGBT dimana media tersebut mendiskripsikan tentang kehidupan para Gay di Thailand meliputi aspek spiritual, seksualitas, hiburan, pendidikan, karir, dan kehidupan sosialnya dengan sesama komunitas Gay dan komunitas Lesbian, Transgender dan Biseksual di Thailand beserta beberapa tuntutan mereka pada pemerintah Thailand terkait dengan adanya poin-poin Hak Asasi Manusia yang tertuang dalam Rancangan Undang-Undang Gender Ketiga. Situs tersebut juga memberikan kesempatan bagi para Gay yang lain untuk bergabung dalam mengekspresikan sisi seksualnya serta menyampaikan beberapa aspirasi terkait kehidupan Gay yang dijalaninya.

Selanjutnya adalah media wisata on line yakni Travel Gay Asia dimana media tersebut merupakan sarana hiburan wisata bagi para Gay untuk melakukan perjalanan wisata melalui biro khusus Gay yang diadakan di Thailand. Obyek wisata yang ditawarkan meliputi berbagai tempat di seluruh Asia Pasifik dengan pilihan paket tertentu meliputi fasilitas hotel, kuliner, belanja atau shopping dan transportasi udara, laut serta darat. Hingga saat ini, Travel Gay Asia mendapatkan respon yang positif dari para gay di Thailand dan memiliki konsumen yang makin bertambah dari waktu ke waktu. Media wisata ini juga memancing perhatian para Thai serta masyarakat Thailand secara umum dan pemerintah Thailand dengan memberikan ijin penyelenggaraan.

Komunitas LGBT di Thailand juga memproduksi media on line untuk situs hiburan berupa film, sinematografi, dan film dokumenter yang diprakarsai oleh berbagai perusahaan perfilman seperti Sahamongkol Film International, GMM, Come On Sweet (TH), dan lain-lain dimana film tersebut berisikan tentang kehidupan Gay, Lesbian, Transgender dan Biseksual yang mendapatkan diskriminasi sosial dari lingkungan keluarga dan masyarakat Thailand namun mereka tetap bersikukuh mempertahankan keberadaannya di Thailand. Film-film tersebut juga mengisahkan tentang kebebasan ekspresi seksual para Gay, Lesbian, Transgender dan Biseksual yang mereka perlihatkan di berbagai tempat seperti di sekolah, kampus, kantor, dan tempat lain sehingga mampu menarik perhatian para penonton (Farmer, 2011). Selanjutnya pemerintah Thailand juga diketahui memberikan ijin penyelenggaraan film-film tersebut sebagai bentuk toleransi terhadap komunitas LGBT di Thailand.

Pemerintah Thailand diketahui juga mulai memberikan respon positif terhadap keberadaan para LGBT terkait dengan aksinya yang makin marak seperti adanya komunitas LGBT yang bekerjasama dengan Bangkok Metropolitan Administration dan yayasan Amfar yang bergerak dalam perlindungan hak dan keadilan seksual yakni Sexual Orientation And Gender Identity (SOGI) yang di dalamnya juga melibatkan kelompok LGBT yakni Thai Transgender Alliance (Thai TGA).

Mereka juga mengadakan workshop dengan label "*Where Everyone Can Express Themselves.*" yang diadakan di *Bangkok Art and Cultural Center* pada 16 Mei 2014 yang bertujuan dalam menjelaskan tentang kebebasan dan hak individu transgender Thailand dalam mengakses layanan publik negara, layanan sektor swasta serta pekerjaan. Acara tersebut diketahui dihadiri oleh Wakil Gubernur Bangkok, Dr. Bhoomsadee Tamthai dengan memberikan sambutan pembuka serta

menghadirkan para pembicara tamu yakni Sarina Thai, model super trans Thailand dan Poy Treechada dan seorang artis yakni Miss International (IDAHO, 2014).

Selanjutnya, kelompok LGBT di Thailand juga memiliki beberapa organisasi yang diantaranya adalah IDAHOT yang merupakan kepanjangan dari *International Day Against Homophobia and Transphobia*, di mana didalamnya terdapat beberapa aktivis yang didukung oleh sukarelawan dari Rainbow Sky Association Thailand, Anjaree, Galaya Club, People's Empowerment Foundation, SWING dan The Poz. Kelompok ini memiliki visi dan misi yang berorientasi pada kebebasan berekspresi yang ditunjukkan dalam bentuk kampanye pada tanggal 17 Mei 2014 yakni aksi advokasi media sosial yang pintar dan bebas biaya dengan penekanan kata kebebasan berekspresi yaitu "Ini saya! Inilah kita!". Kampanye ini juga melakukan upacara lilin pada malam hari sebagai penutup (IDAHO, 2014).

### **Bekerjasama dengan pemerintah Thailand melalui para parlemen secara perorangan atau kelompok agar mempermudah aksi mereka selanjutnya.**

Komunitas LGBT di Thailand bekerjasama dengan Non Governmental Organization (NGO) yaitu lembaga swadaya masyarakat atau suatu organisasi non pemerintah dalam rangka melobi pemerintah Thailand melalui parlemen yakni Constitution Drafting Assembly (CDA) yang merupakan badan legislatif di Thailand untuk menyusun Konstitusi Kerajaan Thailand secara permanen. Constitution Drafting Assembly (CDA) secara konstitusi Thailand dibentuk setelah junta militer merebut kekuasaan di negara tersebut atau dengan alasan kebutuhan untuk menyelesaikan krisis politik di negara Thailand (Sanders, 2011).

Salah satu komunitas LGBT yang memiliki tugas khusus untuk melobi CDA dalam rangka mengesahkan Rancangan Undang-Undang Gender Ketiga adalah

Anjaree yang mana komunitas ini secara tidak langsung telah menuntut perubahan legislatif dan kebijakan pemerintah Thailand terkait dengan adanya tuntutan kebijakan untuk mengesahkan keberadaan komunitas LGBT sebagai kelompok masyarakat baru yang perlu diperhatikan oleh legislatif sebagai kelompok masyarakat di Thailand sebagai akibat dari perkembangan dunia global.

Salah satu anggota CDA yang menerima lobi dari komunitas LGBT dan NGO untuk mendesak dikeluarkannya Rancangan Undang-Undang Gender Ketiga pada CDA adalah Naiyana Suphapung, dimana pada tahun 2007 dia telah menyatakan pada komunitas LGBT di Thailand untuk segera menindaklanjuti Landasan Hukum yang diperlukan oleh komunitas LGBT untuk melindungi kehidupan mereka nantinya (Sanders, 2011).

Naiyana Suphapung juga merupakan seorang komisioner dari CDA yang memiliki kedekatan yang erat dengan kerajaan Thailand dan bahkan Naiyana Suphapung sendiri juga ditunjuk oleh raja Thailand untuk segera mengatasi polemik sosial yakni pengakuan keberadaan LGBT oleh komunitas LGBT di Thailand (Sanders, 2011).

Naiyana Suphapung selanjutnya membentuk komisi darurat untuk penyelesaian kasus diskriminasi sosial terhadap komunitas LGBT sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia di Thailand. Naiyana Suphapung pada bulan November 2011 melalui komisinya pernah melakukan dialog secara khusus terhadap para Lesbian yakni dari komunitas Anjaree melalui seminar. Seminar ini menghasilkan sebuah artikel di media massa Thailand yakni mengenai penghentian kekerasan seksual dan diskriminasi terhadap komunitas LGBT. Komisariss Naiyana jelas telah meramalkan peran untuk isu-isu LGBT dan organisasi dalam pekerjaan merevisi konstitusi, menyebutkan ini sedini Januari 2007 di pertemuan dewan Bangkok Pride (Sanders, 2011).

Naiyana Suphapung telah memainkan peran ganda dengan memfasilitasi pembentukan Jaringan Keanekaragaman Seksual dan menyarankan agenda melobinya sehingga Naiyana mendapat dukungan dari anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia lainnya. Komisi ini berkomitmen untuk memainkan peran aktif dalam konsultasi publik mengenai revisi konstitusi, serta melobi isu-isu LGBT menjadi proyek bersama di komisi tersebut.

Selanjutnya Anjaree dalam melobi sistem parlemen juga bekerjasama dengan universitas Mahidol dan Thammasat di Thailand yakni kegiatan jurnalisme yakni penciptaan artikel Bangkok Post yang membahas tentang pemberian kebebasan bagi kehidupan LGBT di Thailand sebagai bentuk perlindungan hak asasi manusia namun hal ini memuat pro dan kontra dari masyarakat Thailand dimana sebagian besar tidak setuju akan keberadaan LGBT di Thailand yang dipandang melanggar nilai-nilai kemanusiaan yang mendasarkan pada unsur spiritual serta budaya Thailand.

Pada pertengahan tahun 2007, komunitas LGBT di Thailand juga telah melakukan lobi politik terhadap pemerintah Thailand dengan membentuk komunitas yang bernama “Sexual Diversity Network” yakni berupa pengajuan pengakuan kepada pemerintah Thailand untuk menerima komunitas LGBT sebagai kelompok seksual yang berbeda dengan masyarakat Thailand yang lain (Sanders, 2011).

Sexual Diversity Network ini menghasilkan beberapa ketentuan yakni sponsorship, pengakuan, dan perlindungan para pemimpin dan organisasi tertentu terhadap keberadaan LGBT di Thailand dan upaya untuk menyatukan beragam kelompok LGBT dan aktivis dari semua bagian negara, terutama pada lokakarya tentang hak-hak seksual pada bulan April 2007 (Sanders, 2011).

Para komunitas LGBT di Thailand juga melakukan komunikasi dengan anggota Constitutional

Drafting Assembly (CDA) yakni parlemen di Thailand terkait dengan beberapa poin atau hal-hal yang menjadi tuntutan mereka pada Rancangan Undang-Undang Gender Ketiga meliputi anti diskriminasi sosial serta perlindungan hak-hak mereka yang sama dengan kaum non LGBT oleh pemerintah Thailand (UNDP & USAID, 2014).

Beberapa tuntutan yang diajukan komunitas LGBT dan diprakarsai oleh Anjana Suvarnanda sebagai pendiri Anjaree terhadap isi Rancangan Undang-Undang Gender Ketiga pada CDA meliputi berbagai aspek seperti pada aspek pendidikan dimana mereka menuntut persamaan hak untuk mendapatkan pendidikan formal dan informal di Thailand tanpa disudutkan terkait dengan statusnya yang Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (UNDP & USAID, 2014).

Selanjutnya mereka juga menuntut adanya hak untuk tetap menjalankan ibadah agamanya terlepas dari peraturan bahwa umat beragama tidak hanya pada para umat yang bukan kaum Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender karena menjalankan ibadah adalah salah satu poin dalam pelaksanaan Hak Asasi Manusia.

Komunitas LGBT di Thailand juga menuntut adanya kesamaan hak dalam memperoleh pekerjaan atau mendirikan usaha yang sama dengan komunitas non LGBT karena hal itu merupakan salah satu perwujudan dalam Hak Asasi Manusia (UNDP & USAID, 2014).

Komunitas LGBT juga menuntut persamaan hak antara peran laki-laki dan perempuan yang mereka terapkan sesuai statusnya sebagai Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender dalam menjalankan kehidupan mereka sehari-hari dengan pasangannya.

Rancangan Undang-Undang Gender Ketiga juga harus mendukung hak-hak para Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender untuk melakukan aktivitas kehidupan kesehariannya tanpa adanya diskriminasi dan kriminalisasi dari masyarakat Thai selagi tidak merugikan secara fisik dan psikologis bagi orang lain.

Kelompok LGBT yakni Rainbow Sky yang diprakarsai oleh Kittinan Tharamatat juga membentuk kelompok advokasi untuk hak gay yang mengatakan bahwa jika piagam baru untuk mengakui seksualitas yang beragam dan mengamankan persamaan hak untuk komunitas gay dimana hal tersebut harus ada dalam poin Rancangan Undang-Undang Gender Ketiga (Ammon, 2007).

Pembicaraan dengan anggota CDA yang diadakan oleh komunitas LGBT juga membahas tentang Undang-undang pemerkosaan, yang saat ini hanya melindungi korban perempuan, misalnya, harus diubah untuk melindungi laki-laki, homoseksual dan juga transgender (Ammon, 2007).

Selanjutnya kaum LGBT juga menuntut untuk dilegalkannya pernikahan sesama jenis, sehingga memungkinkan mitra homoseksual, biseksual dan transgender memiliki hak waris dari pasangannya dan di datu sisi, mereka juga menuntut untuk diberi hak dalam mengadopsi anak untuk melengkapi kehidupan pernikahan mereka (Laohong & Sabpaitoon, 2018).

Beberapa tuntutan tersebut mereka ajukan pada anggota parlemen yakni CDA untuk menciptakan keseimbangan dalam interaksi sosial antara masyarakat sekitar dan keluarga untuk mendukung ketentuan anti-diskriminasi dalam rancangan konstitusi karena meskipun Thailand secara luas telah toleran terhadap kaum gay, waria dan transseksual yang memiliki kehadiran reguler di TV, di film dan bisnis hiburan namun masih banyak yang menghadapi tekanan keluarga, prasangka sosial dan kekerasan dalam rumah tangga hal ini perlu dipertimbangkan oleh Dewan Legislatif Nasional (*National Legislative Assembly*).

### **Bekerjasama melalui komunikasi yang intensif terhadap Organisasi dunia**

Bekerjasama melalui komunikasi yang intensif terhadap Organisasi Internasional PBB dengan OHCHR terkait dengan proses legalisasi Hak Asasi Manusia atas status sosial mereka serta bekerjasama dengan UNDP terkait dengan perlindungan hukum keberadaan mereka di Thailand (OHCHR, 2017; UNDP & USAID, 2014).

Gerakan komunitas LGBT di Thailand juga mendapat perhatian dari Organisasi untuk perdamaian dunia yakni PBB dimana melalui OHCHR telah mendukung keberadaan LGBT di Thailand sebagai salah satu perwujudan dari hak asasi manusia dalam mengekspresikan seksual mereka (Kaleidoscope Human Rights Foundation, 2016).

Hal ini mempermudah komunitas LGBT untuk melakukan strategi gerakannya yakni dengan menjalin komunikasi yang intensif dengan OHCHR melalui pembicaraan langsung dan dengan perantara NGO terkait dengan segala kondisi dan situasi yang mereka alami di Thailand terkait dengan diskriminasi sosialnya di berbagai aspek kehidupan sehingga menghasilkan imbauan dari OHCHR dalam bentuk rekomendasi untuk menghargai hak-hak seksual para LGBT dan segera membentuk peraturan tertulis dalam bentuk landasan hukum pada pemerintah sehubungan dengan perlindungan komunitas LGBT di Thailand (OHCHR, 2017).

Komunitas LGBT juga telah meminta OHCHR untuk turun langsung ke Thailand sebagai perwujudannya dalam menciptakan kedamaian dunia sehubungan dengan peran OHCHR untuk memberikan perlindungan hukum terhadap keberadaan LGBT di Thailand sehingga menghasilkan keputusan tertulis dari pihak OHCHR pada pemerintah Thailand untuk memberikan perlindungan hukum pada komunitas LGBT melalui beberapa teknik organisasi yakni membentuk komisi perlindungan publik terhadap kaum LGBT, menciptakan sekretariat jenderal

untuk menangani polemik keberadaan LGBT. Komunitas LGBT juga meminta OHCHR untuk mengadakan pertemuan khusus dengan pemerintah Thailand terkait dengan polemik LGBT sehingga melibatkan pemerintah Thailand sehubungan dengan penyelesaian konflik LGBT.

Komunitas LGBT juga meminta perlindungan administratif pada OHCHR dalam memberikan perlindungan hukum yakni dengan melakukan pengawasan serta sanksi hukum bagi pemerintah Thailand yang melakukan diskriminasi ataupun kekerasan pada komunitas LGBT dimana dalam merealisasikan perannya secara administratif tersebut, OHCHR telah bekerjasama secara sinergis dengan pemerintah Thailand hingga diciptakannya Rancangan Undang-Undang Gender Ketiga (OHCHR, 2017).

Komunitas LGBT juga meminta OHCHR untuk menjalin komunikasi dengan masyarakat Thailand melalui perwakilannya di parlemen Thailand selain juga perwakilan dari komunitas LGBT terkait dengan diskriminasi serta kekerasan yang dialami oleh para LGBT. Terkait dengan pertemuan khusus antara OHCHR, pemerintah Thailand, Thai dan LGBT tersebut, hingga saat ini masih belum menghasilkan kesepakatan yang masiv sehubungan dengan beberapa faktor yang mempengaruhinya diantaranya adalah penerimaan golongan masyarakat homogen dimana kelompok masyarakat ini adalah kelompok terbesar di Thailand yang masih menjunjung tinggi peradapan spiritual Budha dan nilai-nilai spiritual sejarah Thailand yang menghadapkan pada keaslian gender dalam interaksi sosial sehari-hari sehingga masih belum dapat sepenuhnya menerima keberadaan LGBT di Thailand.

Selanjutnya komunitas LGBT di Thailand juga bekerjasama dengan OHCHR untuk menghadapi kasus diskriminasi sosial dengan bentuk pengawasan khusus dari OHCHR yang diteruskan dengan lobi politik dengan pemerintah Thailand dalam memberikan perlindungan

hukum bagi kaum LGBT serta mendesak untuk segera menciptakan ketentuan hukumnya sehingga menghindarkan komunitas LGBT dari diskriminasi serta kekerasan fisik ataupun psikologis ke depannya.

Komunitas LGBT juga telah menjalin hubungan dengan United Nation Development Program (UNDP) sebagai perpanjangan tangan dari OHCHR untuk memberikan beberapa fasilitas berupa sarana dan prasarana baik terhadap pemerintah Thailand maupun kepada komunitas LGBT itu sendiri sehingga menghasilkan dukungan dari UNDP berupa pemberian dana sebesar 27 miliar rupiah pada tahun 2016 yang diserahkan secara langsung pada pemerintah Thailand untuk memajukan kesejahteraan komunitas LGBT di Thailand serta untuk mengurangi ketimpangan dan marginalisasi atas dasar orientasi seksual dan identitas gender (Hutapea, 2016).

Bentuk kesejahteraan yang diberikan kepada komunitas LGBT adalah dengan meningkatkan kualitas kesehatannya dan pembangunan fasilitas kesehatan untuk upaya preventif hingga kuratif, kualitas pendidikan berupa pemberian edukasi seksual serta kelayakan pendidikan yakni meningkatkan skill atau keterampilan di berbagai bidang sehingga berguna bagi kehidupan para LGBT di masa mendatang serta penyuluhan kepada para LGBT agar terhindar dari virus HIV/ AIDS yang beresiko diderita oleh komunitas LGBT di Thailand (UNDP & USAID, 2014).

Komunitas LGBT juga meminta pada UNDP untuk bersinergi dengan pemerintah Thailand dalam memberikan sarana berupa media informasi pada para LGBT di Thailand yakni sarana media dengan teknologi informatika untuk menyuarakan aspirasi, pendapat dan ekspresi seksualnya pada khalayak luas (UNDP & USAID, 2014).

Selanjutnya komunitas LGBT juga bekerjasama dengan UNDP dan Asia Pacific Forum of National Human

Rights Institutions untuk mendukung hak asasi manusia bagi komunitas LGBT berupa penyelenggaraan sharing hingga perlindungan psikologis serta fisik komunitas LGBT di Thailand terkait dengan dukungan orientasi seksual mereka, identitas seksual, serta perlindungan pada beberapa kelompok lesbian, gay, bisexual, transgender terkait dengan hak-hak mereka di Thailand (OHCHR, 2017).